



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dan adanya kebijakan nasional tentang efisiensi anggaran serta penyesuaian terhadap Visi Misi Walikota terpilih 2025-2030, perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program kegiatan dan/atau subkegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026.

7. Rencana Pembangunan tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan/atau subkegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

1. Perubahan Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.
2. Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada Perubahan RKPD.
3. Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA-SKPD.

Pasal 3

1. Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan
BAB III : Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah
BAB IV : Penutup
2. Rincian Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 4

Perubahan Renja-PD terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025.
2. Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025.
3. Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025.
4. Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025.
5. Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025.
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025.
9. Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2025.
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2025.
12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025.
14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025.
15. Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025.
16. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2025.
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025.
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025.
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025.
20. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025.
21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2025.
22. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025.
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025.
24. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2025.
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025.

26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025.
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025.
28. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025.
29. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025.
30. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 Juli 2025

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 25 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN 2025

1. PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dimaksud dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, yang dituangkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana dalam lampiran Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, bahwa seiring dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan saat ini, begitu pula berkenaan dengan Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar 2025. Selain itu Pemerintah Kota Blitar juga terus melanjutkan pembangunan diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang selaras dengan tema sebelumnya yaitu: “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perdagangan yang Berbasis Digital menuju Kemandirian Ekonomi Daerah”. Prioritas kebijakan selain terkait dengan berbagai kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi yang tertuang dalam RKP Tahun 2025, juga didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2025 dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SILPA) tahun 2024 yang harus digunakan untuk perubahan anggaran tahun 2025 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
3. Efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025 sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025;
4. Penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan Perangkat Daerah yang dipandang prioritas serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya guna mendukung pencapaian kinerja tahun 2025.

Sebagaimana pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Perubahan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan aturan yang telah ditetapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025. P-Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi, keselarasan dan kesinambungan upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2025 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2025 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2025.

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut :

- Sebagai pedoman penyusunan perubahan KUAPPAS atau Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025;
- Sebagai gambaran dan pedoman penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2025 disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini memuat telaah evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan Triwulan II baik secara kinerja maupun anggaran. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target periode akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Pada bab ini disajikan:

- ✓ *Tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025*
- ✓ *Narasi hasil evaluasi sesuai tabel, memuat:*
 - *Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;*
 - *Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;*
 - *Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja;*
 - *Implikasi yang timbul terhadap target capaian program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah;*
 - *Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.*

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat perubahan tujuan, sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2025 berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya.

Pada bab ini disajikan:

- ✓ *Tabel Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025*
- ✓ *Tabel Rencana Tindak Lanjut LKj IP Tahun 2024*
- ✓ *Tabel Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 yang mengalami Perubahan*
- ✓ *Tabel Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026*

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup.

Pada bab ini disajikan:

- ✓ *Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;*
- ✓ *Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan*
- ✓ *Rencana tindak lanjut.*

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari program/kegiatan/sub kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada bab ini disajikan capaian terhadap hasil pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan semester 1 (satu) tahun 2025 sesuai yang tertuang pada Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 dengan mengacu pada APBD tahun 2025, sehingga bisa dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun perubahan perencanaan dan anggaran pada semester 2 (dua) tahun 2025.

Selain itu guna melihat progres pencapaian kinerja tahunan terhadap target Renstra maka perlu disandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2024.

Adapun program Sekretariat Daerah Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Perekonomian dan Pembangunan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Tabel 2.1

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Blitar:

1. Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
										K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (8+9)		11 = (10/7) x 100%		12 = (6+10)		13 = (11/5) x 100%		14
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																						
BAGIAN PEMERINTAHAN																					Bagian Pemerintahan	
Tujuan 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah			1. Status EKPPD	Nilai	Sangat Tinggi (3,3538)		Sedang (3,3670)		Sangat Tinggi (3,3536)	-		-		-				Sedang (3,3670)		100,39		
Sasaran 1: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan			1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perkonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	persen	100		100		100													
1		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	persen	100	0,00	142.86	21.197.500,00	85.71	196.636.270,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	kelurahan	21	120.646.500,00	38	21.197.500,00	20	196.636.270,00	0	0,00	21	0	21	0,00	105	0	21	0,00	0	0

- 8 -

N o	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (8+9)		11 = (10/7) x 100%		12 = (6+10)		13 = (11/5) x 100%		14	
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	dokumen	21	120.646.500,00	42	21.197.500,00	21	196.636.270,00	21	0,00	0	0	21	0,00	100	0	21	0,00	0	0		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																						100	0	
Predikat kinerja																						Sangat Tinggi		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																						105	0	
Predikat kinerja																						Sangat Tinggi		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) kepedulian perangkat kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya pada administrasi pemberdayaan masyarakat (2) adanya monev dari Provinsi yang bisa menjadi motivasi untuk segera melaksanakan evaluasi diri perkembangan desa kelurahan																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : (1) Belum terbiasa melaksanakan tugas evaluasi diri evaluasi perkembangan desa kel dan updating data profil secara mandiri, dan masih bergantung pada surat atau permintaan (2) updating data profil belum dilaksanakan di tribulan I																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : (1) Menyampaikan surat permintaan updating data profil ke kelurahan (2) menekankan ke Kecamatan agar melaksanakan fasilitasi penggalian data dari OPD terkait sebagai bahan updating data profil																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : (1) melaksanakan pembinaan secara rutin ke Kelurahan dan kecamatan																								
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																								
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH																								
Tujuan 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah			1. Status EKPPD	Nilai	Sangat Tinggi (3,3538)		Sedang (3,3670)		Sangat Tinggi (3,3536)	-		-		-				Sedang (3,3670)		100,39		Bagian Pemerintaha n		
Sasaran 1: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan			1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	persen	100		100		100															
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan pemerintahan yang ditindaklanjuti	persen	100	1.160.063.894,00	100	2.123.882.191,00	100	2.358.919.600,00	100	377.236.050,00	100	0	200	377.236.050,00	200	16	200	377.236.050,00	200	32,5		
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	persen	100	1.160.063.894,00	100	2.123.882.191,00	100	2.358.919.600,00	100	377.236.050,00	100	0	200	377.236.050,00	200	16	200	377.236.050,00	200	32,5		

- 9 -

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (8+9)		11 = (10/7) x 100%		12 = (6+10)		13 = (11/5) x 100%		14
		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaa n tugas kewilayah a n yang terfasilitasi	persen	100	2.322.598.258,00	100	1.461.774.651,00	100	2.125.310.900,00	0	374.986.050,00	20	0	20	374.986.050,00	20	17.6	20	374.986.050,00	0	16.1	
		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaa n tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	persen	100	2.322.598.258,00	165	1.461.774.651,00	100	2.125.310.900,00	0	374.986.050,00	25	0	25	374.986.050,00	25	17.6	25	374.986.050,00	0	16.1	
		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase lembaga kemasyarak at an kelurahan yang aktif	persen	100	2.322.598.258,00	0	1.461.774.651,00	100	2.125.310.900,00	0	374.986.050,00	100	0	100	374.986.050,00	100	17.6	100	374.986.050,00	0	16.1	
		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaa n tugas Pemerintah an umum yang terfasilitasi	persen	100	2.322.598.258,00	105	1.461.774.651,00	100	2.125.310.900,00	0	374.986.050,00	10	0	10	374.986.050,00	10	17.6	10	374.986.050,00	0	16.1	
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	dokumen	10	252.794.200,00	10	252.270.734,00	10	562.638.900,00	5	56.577.500,00	1	0	6	56.577.500,00	60	10.1	6	56.577.500,00	0	22.4	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayah a n	dokumen	5	1.915.110.558,00	5	1.104.958.529,00	5	858.664.700,00	1	159.641.000,00	1	0	2	159.641.000,00	40	18.6	2	159.641.000,00	0	8.3	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaa n Otonomi Daerah	dokumen	4	154.693.500,00	4	104.545.388,00	4	704.007.300,00	3	158.767.550,00	1	0	4	158.767.550,00	100	22.6	4	158.767.550,00	0	102.6	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																							
Predikat kinerja																							
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanj uti	persen	83,33	77.311.500,00		662.107.540,00		233.608.700,00		2.250.000,00		0	0	2.250.000,00	0	1	0	2.250.000,00	0	2.9	

- 11 -

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang gung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (8+9)		12 = (10/7) x 100%		11 = (6+10)		13 = (11/5) x 100%		14
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																							
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH																							
BAGIAN HUKUM																							
Tujuan 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah			1. Status EKPPD	Nilai	Sangat Tinggi (3,3538)		Sedang (3,3670)		Sangat Tinggi (3,3536)		-		-		-				Sedang (3,3670)		100,39		Bagian Hukum
Sasaran 1: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan			1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	perse n	100		100		100														
1		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	perse n	100	1.160.063.894,00	100	745.728.950,00	100	660.139.700,00	100	48.006.300,00	100	0	200	48.006.300,00	200	7.3	200	48.006.300,00	200	4.1	
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	perse n	100	660.140.200,00	100	745.728.950,00	100	660.139.700,00	100	48.006.300,00	0	0	100	48.006.300,00	100	7.3	100	48.006.300,00	0	7.3	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	doku men	320	207.338.900,00	320	345.996.037,00	320	221.168.200,00	101	8.811.300,00	55	0	156	8.811.300,00	48.8	4	156	8.811.300,00	0	4.2	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (8+9)		12 = (10/7) x 100%		11 = (6+10)		13 = (11/5) x 100%		14
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																							
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH																							
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																						Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
Tujuan 2 : Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	84,25		85,49	84		-		-		-				85,49		101,47			
Sasaran: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan			Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	persen	100		100	100															
1		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	persen	100	1.160.063.894,00	100	9.349.547.640,00	100	9.196.827.200,00	50	567.890.030,00	33.33	0	83.33	567.890.030,00	83.3	6.2	83.33	567.890.030,00	83.3	49	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	rumusan kebijakan	6	8.781.778.500,00	4	9.349.547.640,00	6	9.196.827.200,00	3	567.890.030,00	2	0	5	567.890.030,00	83.3	6.2	5	567.890.030,00	0	6.5	
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		25	8.563.539.500,00	39	9.156.684.400,00	25	8.979.252.900,00	8	558.338.030,00	10	0	18	558.338.030,00	72	6.2	18	558.338.030,00	0	6.5	
Tujuan 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah			1. Status EKPPD	Nilai	Sangat Tinggi (3,3538)		Sedang (3,3670)		Sangat Tinggi (3,3536)		-		-		-			Sedang (3,3670)		100,39			

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (8+9)		12 = (10/7) x 100%		11 = (6+10)		13 = (11/5) x 100%		14		
Sasaran 1: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan			1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	persen	100		100		100																
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	100	1.160.063.894,00	100	9.349.547.640,00	100	9.196.827.200,00	25	567.890.030,00	25	0	50	567.890.030,00	50	6.2	50	567.890.030,00	50	49			
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	rumusan kebijakan	4	8.781.778.500,00	6	9.349.547.640,00	4	9.196.827.200,00	1	567.890.030,00	1	0	2	567.890.030,00	50	6.2	2	567.890.030,00	0	6.5			

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (8+9)		12 = (10/7) x 100%		11 = (6+10)		13 = (11/5) x 100%		14	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas	dokumen	2	114.023.300,00	2	103.091.340,00	2	122.240.900,00	1	7.660.000,00	1	0	2	7.660.000,00	100	6.3	2	7.660.000,00	0	6.7		
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	dokumen	2	104.215.700,00	2	89.771.900,00	2	95.333.400,00	0	1.892.000,00	1	0	1	1.892.000,00	50	2	1	1.892.000,00	0	1.8		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																						74	4,8	
Predikat kinerja																						Sedang		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																						66.7	6.2	
Predikat kinerja																						Sedang		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi yang baik dengan perangkat daerah maupun lintas sektor																								

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
										K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (8+9)		12 = (10/7) x 100%		11 = (6+10)		13 = (11/5) x 100%		14		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : (a) Belum optimalnya komitmen bersama dan persamaan persepsi antar stakeholder terkait implementasi kebijakan bidang keagamaan dan kesejahteraan rakyat (b) Belum adanya peta kebijakan kesejahteraan rakyat yang bisa mendukung langsung pencapaian tujuan kesejahteraan sosial dan masyarakat																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : (a) Menyusun dan memonev rumusan kebijakan bidang bina mental spiritual masyarakat dan kesra secara berkala (b) Mensosialisasikan kebijakan yang mendukung pembinaan mental spiritual masyarakat dan kesra (c) Koordinasi lintas sektor atau antar stakeholder yang intensif guna penguatan komitmen dan penyamaan persepsi terkait implementasi kebijakan bidang keagamaan dan kesra																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Perlunya persamaan persepsi dan komitmen antar lintas sektor terkait pelaksanaan kebijakan bina mental spiritual dan kesra																								
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	dokumen	90	1.240.625.011,00	99.5	757.073.357,00	100	817.794.567,00	33.33	41.442.344,00	33.33	0	66.66	41.442.344,00	66.7	5.1	66.66	41.442.344,00	74.1	3.3		
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	rumusan kebijakan	6	651.438.400,00	6	536.335.593,00	6	617.794.567,00	2	39.759.344,00	2	0	4	39.759.344,00	66.7	6.4	4	39.759.344,00	0	6.1		
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	dokumen	2	234.376.000,00	2	226.108.777,00	2	215.867.767,00	1	7.528.922,00	0	0	1	7.528.922,00	50	3.5	1	7.528.922,00	0	3.2		
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	laporan	2	220.108.200,00	2	156.159.130,00	2	218.140.000,00	0	18.684.000,00	4	0	4	18.684.000,00	200	8.6	4	18.684.000,00	0	8.5		
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	dokumen	4	196.954.200,00	4	154.067.686,00	4	183.786.800,00	1	13.546.422,00	1	0	2	13.546.422,00	50	7.4	2	13.546.422,00	0	6.9		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100	6.5		
Predikat kinerja																					Sangat Tinggi			

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (8+9)		12 = (10/7) x 100%		11 = (6+10)		13 = (11/5) x 100%		14	
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	dokumen	2	202.817.662,00	2	220.737.764,00	2	200.000.000,00	0	1.683.000,00	0	0	0	1.683.000,00	0	0.8	0	1.683.000,00	0	0.8		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	dokumen	2	202.817.662,00	2	220.737.764,00	2	200.000.000,00	0	1.683.000,00	2	0	2	1.683.000,00	100	0.8	2	1.683.000,00	0	0.8		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																						100	0.8	
Predikat kinerja																						Sangat Tinggi		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																						33.3	3.6	
Predikat kinerja																						Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) Langkah-langkah revitalisasi struktur dan kultural manajemen BUMD (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar) (2) Potensi UKM, IKM dan Ekraf Kota Blitar cukup menjadi modal dan didukung dengan agenda Kota Blitar tahunan (event) yang semakin digiatkan oleh Perangkat Daerah pelaksana (3) Koordinasi yang baik dengan lintas OPD dan lintas sektor anggota TPID Kota Blitar (4) Koordinasi yang baik dengan lintas sektor, terutama dengan Bagian SDA Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur dan Bea Cukai Blitar																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : (1) Perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang memerlukan penyesuaian pelaksanaan perencanaan dan pelaporan DBHCHT (2) Kurang optimalnya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : (1) Melakukan percepatan restrukturisasi melalui penetapan Organ BUMD dengan penguatan komitmen melalui perjanjian kinerja dan penerapan ketentuan Perda yang menjadi dasar penyelenggaraan BUMD (2) Optimalisasi Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya : Optimalisasi Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil																								

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang gung Jawab	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (8+9)		12 = (10/7) x 100%		11 = (6+10)		13 = (11/5) x 100%		14
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																							
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH																							
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA																						BLP	
Tujuan 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah			1. Status EKPPD	Nilai	Sangat Tinggi (3,3538)		Sedang (3,3670)		Sangat Tinggi (3,3536)	-		-		-				Sedang (3,3670)		100,39			
Sasaran 1: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan			2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	persen	100		100		100														
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	persen	100	1.240.625.011,00	100	696.665.395,00	100	638.969.100,00	10	84.293.550,00	20	0	30	84.293.550,00	30	13.2	30	84.293.550,00	33.3	6.8	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	persen	90	1.240.625.011,00	65	696.665.395,00	76.67	638.969.100,00	12.3	84.293.550,00	11.09	0	23.39	84.293.550,00	30.5	13.2	23.39	84.293.550,00	23.4	6.8	
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	bahan kebijakan	10	159.849.100,00	10	154.014.440,00	10	149.597.800,00	1	12.584.500,00	2	0	3	12.584.500,00	30	8.4	3	12.584.500,00	0	7.9	
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	dokumen	6	36.413.400,00	6	36.157.200,00	6	46.413.400,00	1	845.500,00	1	0	2	845.500,00	33.3	1.8	2	845.500,00	0	2.3	

- 19 -

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (8+9)		12 = (10/7) x 100%		11 = (6+10)		13 = (11/5) x 100%		14
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	laporan	16	123.435.700,00	16	117.857.240,00	16	103.184.400,00	3	11.739.000,00	4	0	7	11.739.000,00	43.8	11.4	7	11.739.000,00	0	9.5	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					38.5	6.6	
Predikat kinerja																					Sangat Rendah		
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	nilai	9/9	479.120.000,00	8	542.650.955,00	7	489.371.300,00	0	71.709.050,00	0	0	0	71.709.050,00	0	14.7	0	71.709.050,00	0	15	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	SKM Layanan UKPBJ	nilai	84,00	479.120.000,00	170.55	542.650.955,00	83,00	489.371.300,00	0	71.709.050,00	0	0	0	71.709.050,00	0	14.7	0	71.709.050,00	0	15	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen	80	275.471.400,00	37	260.288.320,00	80	238.765.100,00	0	40.666.550,00	6	0	6	40.666.550,00	7.5	17	6	40.666.550,00	0	14.8	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	dokumen	2	59.892.000,00	2	195.888.400,00	2	111.942.200,00	0	22.000.000,00	1	0	1	22.000.000,00	50	19.7	1	22.000.000,00	0	36.7	
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	orang	300	143.756.600,00	300	86.474.235,00	300	138.664.000,00	45	9.042.500,00	60	0	105	9.042.500,00	35	6.5	105	9.042.500,00	0	6.3	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					30.8	14.4	
Predikat kinerja																					Sangat Rendah		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					10	12.6	
Predikat kinerja																					Sangat Rendah		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang gung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (8+9)		12 = (10/7) x 100%		11 = (6+10)		13 = (11/5) x 100%		14
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																							
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH																							
BAGIAN ORGANISASI																							
Tujuan 4 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	A (90)		A (86,32)		A (89)		-		-		-			A (86,32)		95,91		Bagian Organisasi	
Sasaran: Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	A (90)		A (86,32)		A (89)		-		-		-			A (86,32)		95,91			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	persen	SANGAT BAIK (90)	12.489.965.013,00	SANGAT BAIK (89,23)	851.679.625,00	SANGAT BAIK (89,280)	880.299.400,00	87.95	138.712.650,00	87.95	0	87.95	138.712.650,00	98,51	15.8	88,59	138.712.650,00	98,43	1.1	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	persen	100	35.503.000,00	106.26	12.325.000,00	100	15.554.000,00	31.25	6.080.000,00	0	0	31.25	6.080.000,00	31.3	39.1	31.25	6.080.000,00	31.3	17.1	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	10	16.942.500,00	11	8.627.500,00	10	10.054.000,00	2	1.980.000,00	0	0	2	1.980.000,00	20	19.7	2	1.980.000,00	0	11.7	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	6	18.560.500,00	6	3.697.500,00	6	5.500.000,00	3	4.100.000,00	0	0	3	4.100.000,00	50	74.5	3	4.100.000,00	0	22.1	

[illegible]

N o	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangk at Daerah Penang gung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (8+9)		12 = (10/7) x 100%		11 = (6+10)		13 = (11/5) x 100%		14
Sasaran 2: Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi			Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	perse n	86,21																		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	perse n	100	12.489.9 65.013,0 0	80	851.679. 625,00	86.21	880.299.4 00,00	0	138.712. 650,00	0	0	0	138.712. 650,00	0	15.8	0	138.71 2.650, 00	0	1.1	
		Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	OPD	30	693.301. 273,00	96	723.859. 625,00	26	746.565.4 00,00	0	132.632. 650,00	0	0	0	132.632. 650,00	0	17.8	0	132.63 2.650, 00	0	19.1	
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	doku men	6	182.005. 100,00	6	245.487. 243,00	6	182.878.80 0,00	2	42.663.9 00,00	1	0	3	42.663.9 00,00	50	23.3	3	42.663 .900,0 0	0	23.4	
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	doku men	3	232.479. 900,00	3	210.406. 817,00	3	199.571.50 0,00	0	12.616.7 50,00	0	0	0	12.616.7 50,00	0	6.3	0	12.616 .750,0 0	0	5.4	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	doku men	2	11.700.3 33,00	2	11.109.5 34,00	2	13.308.000 ,00	1	4.000.00 0,00	0	0	1	4.000.00 0,00	50	30.1	1	4.000. 000,00	0	34.2	

- 24 -

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang gung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					I		II		K	Rp.	K	Rp.	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (8+9)		12 = (10/7) x 100%		11 = (6+10)		13 = (11/5) x 100%		14
Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik			1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	perse n	SAN GAT BAIK (90)		SANG AT BAIK (89,23)		SANGA T BAIK (89,280)										SANGA T BAIK (89,23)		99,14		
			2. Persentase OPD yang telah mempunyai inovasi pelayanan publik terintegrasi																				
Sasaran 3: Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik			1. Persentase PD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM																				
			2. Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik																				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	perse n	48.2 8	12.489.9 65.013,0 0	45.71	851.679. 625,00	41.38	880.299.4 00,00	0	138.712. 650,00	0	0	0	138.712. 650,00	0	15.8	0	138.71 2.650, 00	0	1.1	
		Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	OPD	30	693.301. 273,00	96	723.859. 625,00	26	746.565.4 00,00	0	132.632. 650,00	0	0	0	132.632. 650,00	0	17.8	0	132.63 2.650, 00	0	19.1	
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	lapor an	5	248.560. 940,00	5	238.741. 781,00	5	334.013.10 0,00	1	73.352.0 00,00	1	0	2	73.352.0 00,00	40	22	2	73.352 .000,0 0	0	29.5	
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	doku men	3	18.555.0 00,00	3	18.114.2 50,00	3	16.794.000 ,00	1	0,00	1	0	2	0,00	66.7	0	2	0,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					41.3	16.3	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang gung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
										K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (8+9)		12 = (10/7) x 100%		11 = (6+10)		13 = (11/5) x 100%		14
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH																						
BAGIAN UMUM																						Bagian Umum
Tujuan 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	persen	SANGAT BAIK (90)		SANG AT BAIK (89,23)		SANGAT BAIK (89,280)									SANGAT BAIK (89,23)		99,14		
Sasaran: Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik			3. Nilai Rata-rata SKM Setda	nilai																		
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Fasilitas Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	persen	100	12.489.965.013,00	400	26.151.607.951,00	100	26.169.538.541,00	100	5.498.814.019,00	100	0	200	5.498.814.019,00	200	21	200	5.498.814.019,00	200	44
		Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	persen	100	11.158.300,00	100	11.158.200,00	100	1.100.000,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang gung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (8+9)		12 = (10/7) x 100%		11 = (6+10)		13 = (11/5) x 100%		14
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	11.158.300,00	1	11.158.200,00	1	1.100.000,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0	0	
Predikat kinerja																					Sangat Rendah		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	persen	100	9.450.000,00	400	9.275.000,00	100	4.950.000,00	100	2.475.000,00	100	0	200	2.475.000,00	200	50	200	2.475.000,00	0	26.2	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	2	5.210.000,00	2	5.035.000,00	2	2.750.000,00	1	1.375.000,00	0	0	1	1.375.000,00	50	50	1	1.375.000,00	0	26.4	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2	4.240.000,00	2	4.240.000,00	2	2.200.000,00	0	1.100.000,00	1	0	1	1.100.000,00	50	50	1	1.100.000,00	0	25.9	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					50	50	
Predikat kinerja																					Sangat Rendah		
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	persen	100	1.060.000,00	100	1.060.000,00	100	700.000,00	0	0,00	100	0	100	0,00	100	0	100	0,00	0	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang gung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (8+9)		12 = (10/7) x 100%		11 = (6+10)		13 = (11/5) x 100%		14
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	1	1.060.000,00	1	1.060.000,00	1	700.000,00	0	0,00	1	0	1	0,00	100	0	1	0,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100	0	
Predikat kinerja																					Sangat Tinggi		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	persen	100	69.410.200,00	200	137.531.000,00	100	22.205.800,00	100	45.712.200,00	100	0	200	45.712.200,00	200	205.9	200	45.712.200,00	0	65.9	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	100	69.410.200,00	2	137.531.000,00	10	22.205.800,00	4	45.712.200,00	4	0	8	45.712.200,00	80	205.9	8	45.712.200,00	0	65.9	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					80	205.9	
Predikat kinerja																					Tinggi		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	persen	100	4.187.398.000,00	400	4.161.882.838,00	100	4.068.456.000,00	100	1.069.021.776,00	100	0	200	1.069.021.776,00	200	26.3	200	1.069.021.776,00	0	25.5	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	437.000,00	1	437.000,00	1	441.000,00	0	0,00	1	0	1	0,00	100	0	1	0,00	0	0	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	48	1.029.257.000,00	48	992.721.534,00	48	864.885.000,00	12	258.379.455,00	6	0	18	258.379.455,00	37.5	29.9	18	258.379.455,00	0	25.1	

- 29 -

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang gung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (8+9)		12 = (10/7) x 100%		11 = (6+10)		13 = (11/5) x 100%		14
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	6	30.600.000,00	7	29.914.500,00	6	12.000.000,00	0	0,00	6	0	6	0,00	100	0	6	0,00	0	0	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	13	3.127.104.000,00	13	3.138.809.804,00	13	3.191.130.000,00	3	810.642.321,00	4	0	7	810.642.321,00	53.8	25.4	7	810.642.321,00	0	25.9	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					72.8	13.8	
Predikat kinerja																					Sedang		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	persen	100	1.456.487.100,00	400	1.623.951.886,00	100	1.461.992.800,00	100	124.335.400,00	100	0	200	124.335.400,00	200	8.5	200	124.335.400,00	0	8.5	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	2	455.630.100,00	8	388.080.950,00	2	455.618.700,00	2	46.506.600,00	2	0	4	46.506.600,00	200	10.2	4	46.506.600,00	0	10.2	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang gung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (8+9)		12 = (10/7) x 100%		11 = (6+10)		13 = (11/5) x 100%		14
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	65	503.228.000,00	65	570.058.136,00	65	495.752.600,00	7	63.155.800,00	12	0	19	63.155.800,00	29.2	12.7	19	63.155.800,00	0	12.6	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	100	237.929.000,00	118	234.627.600,00	118	163.157.500,00	9	14.673.000,00	19	0	28	14.673.000,00	23.7	9	28	14.673.000,00	0	6.2	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4	259.700.000,00	4	431.185.200,00	3	347.464.000,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					63.2	8	
Predikat kinerja																					Rendah		
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persen	100	923.716.314,00	400	909.781.406,00	100	923.673.914,00	100	237.945.368,00	100	0	200	237.945.368,00	200	25.8	200	237.945.368,00	0	25.8	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang / bulan	2	178.952.314,00	2	171.230.731,00	2	178.952.314,00	2	36.601.418,00	2	0	4	36.601.418,00	200	20.5	4	36.601.418,00	0	20.5	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang gung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (8+9)		12 = (10/7) x 100%		11 = (6+10)		13 = (11/5) x 100%		14
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	paket	23	138.764.000,00	23	138.550.675,00	23	138.721.600,00	8	48.343.950,00	8	0	16	48.343.950,00	69.6	34.8	16	48.343.950,00	0	34.8	
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang	2	6.000.000,00	0	0,00	2	6.000.000,00	0	0,00	2	0	2	0,00	100	0	2	0,00	0	0	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Dana yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang	2	600.000.000,00	8	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2	153.000.000,00	2	0	4	153.000.000,00	200	25.5	4	153.000.000,00	0	25.5	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					142.4	20.2	
Predikat kinerja																					Sangat Tinggi		
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan	persen	100	3.087.322.900,00	400	3.128.192.103,00	100	3.093.126.500,00	100	538.921.001,00	100	0	200	538.921.001,00	200	17.4	200	538.921.001,00	0	17.5	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	paket	4	1.456.623.800,00	16	1.570.172.555,00	4	1.514.704.900,00	4	246.733.569,00	4	0	8	246.733.569,00	200	16.3	8	246.733.569,00	0	16.9	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	paket	4	1.334.617.200,00	16	1.330.121.748,00	4	1.282.342.400,00	4	235.329.032,00	4	0	8	235.329.032,00	200	18.4	8	235.329.032,00	0	17.6	

- 32 -

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang gung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (8+9)		12 = (10/7) x 100%		11 = (6+10)		13 = (11/5) x 100%		14
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	paket	3	296.081.900,00	12	227.897.800,00	12	296.079.200,00	3	56.858.400,00	3	0	6	56.858.400,00	50	19.2	6	56.858.400,00	0	19.2	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					150	17.9	
Predikat kinerja																					Sangat Tinggi		
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	persen	80	1.639.220.200,00	320	1.887.920.171,00	80	857.168.800,00	80	39.752.600,00	80	0	160	39.752.600,00	200	4.6	160	39.752.600,00	0	2.4	
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	laporan	33	1.421.862.900,00	33	1.618.742.800,00	33	717.500.000,00	69	20.815.000,00	98	0	167	20.815.000,00	506.1	2.9	167	20.815.000,00	0	1.5	
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	laporan	400	63.384.000,00	400	59.724.371,00	400	66.471.000,00	81	0,00	96	0	177	0,00	44.3	0	177	0,00	0	0	
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	laporan	3055	153.973.300,00	3055	209.453.000,00	3055	73.197.800,00	162	18.937.600,00	587	0	749	18.937.600,00	24.5	25.9	749	18.937.600,00	0	12.3	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					191.6	9.6	
Predikat kinerja																					Sangat Tinggi		
Tujuan 4 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	A (90)		A (80,06)		A (89)		-		-		-				A (80,06)		88,96%		
Sasaran: Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	A (90)		A (80,06)		A (89)		-		-		-				A (80,06)		88,96%		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang gung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (8+9)		12 = (10/7) x 100%		11 = (6+10)		13 = (11/5) x 100%		14
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	persen	SANGAT BAIK (90)	12.489.965.013,00	0	26.151.607.951,00	89,00	26.169.538.541,00	87.95	5.498.814.019,00	87.95	0	175.9	5.498.814.019,00	197.6	21	175.9	5.498.814.019,00	0	44	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	persen		12.390.692.028,00	400	12.640.112.183,00	100	14.299.748.327,00	100	3.213.736.299,00	100	0	200	3.213.736.299,00	200	22.5	200	3.213.736.299,00	0	25.9	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan		12.381.347.028,00	336	12.631.012.183,00	107	14.295.898.327,00	107	3.213.736.299,00	105	0	212	3.213.736.299,00	198.1	22.5	212	3.213.736.299,00	0	26	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan		9.345.000,00	4	9.100.000,00	4	3.850.000,00	1	0,00	1	0	2	0,00	50	0	2	0,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					124.1	11.2	
Predikat kinerja																					Sangat Tinggi		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	persen	100	1.344.497.800,00	400	1.640.743.164,00	100	1.436.416.400,00	100	226.914.375,00	100	0	200	226.914.375,00	200	15.8	200	226.914.375,00	0	16.9	

- 34 -

N o	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang gung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (8+9)		12 = (10/7) x 100%		11 = (6+10)		13 = (11/5) x 100%		14
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	73.986.100,00	4	73.986.100,00	1	47.912.200,00	1	18.361.500,00	1	0	2	18.361.500,00	200	38.3	2	18.361.500,00	0	24.8	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	7	151.706.500,00	7	202.178.500,00	7	108.346.900,00	2	39.343.000,00	3	0	5	39.343.000,00	71.4	36.3	5	39.343.000,00	0	25.9	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	3	40.479.500,00	3	37.990.500,00	3	31.781.900,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	170	552.096.400,00	267	689.651.400,00	170	773.355.000,00	17	72.828.000,00	44	0	61	72.828.000,00	35.9	9.4	61	72.828.000,00	0	13.2	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	74.642.300,00	5	73.404.575,00	2	43.698.700,00	1	900.000,00	2	0	3	900.000,00	150	2.1	3	900.000,00	0	1.2	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	paket	24	43.650.000,00	24	64.800.000,00	24	48.600.000,00	6	11.040.000,00	6	0	12	11.040.000,00	50	22.7	12	11.040.000,00	0	25.3	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	paket	130	407.937.000,00	276	498.732.089,00	130	382.721.700,00	26	84.441.875,00	26	0	52	84.441.875,00	40	22.1	52	84.441.875,00	0	20.7	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					78.2	18.7	
Predikat kinerja																					Tinggi		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					172.7	34.2	
Predikat kinerja																					Sangat Tinggi		

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

Dari total 4 Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2025, rata-rata capaian kinerja program seluruh Bagian sampai dengan tribulan I adalah 63,35%. Dimana pencapaian rata-rata program pada masing-masing bagian tergambar dalam penjelasan sebagai berikut :

1. Bagian Pemerintahan

Mengampu 2 (dua) Program yakni Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 0,00%. Hal ini dikarenakan pencapaian kinerja program dijadwalkan mulai tribulan II.

a. Program Administrasi Pemerintahan Desa

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) kepedulian perangkat kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya pada administrasi pemberdayaan masyarakat (2) adanya monev dari Provinsi yang bisa menjadi motivasi untuk segera melaksanakan evaluasi diri perkembangan desa kelurahan
- Faktor penghambat pencapaian kinerja : (1) Belum terbiasa melaksanakan tugas evaluasi diri evaluasi perkembangan desa kel dan updating data profil secara mandiri, dan masih bergantung pada surat atau permintaan (2) updating data profil belum dilaksanakan di tribulan I

Sehingga pada tribulan selanjutnya atau pada tribulan II tahun 2025 perlu dilakukan upaya – upaya antara lain :

- (1) Menyampaikan surat permintaan updating data profil ke kelurahan
- (2) Menekankan ke Kecamatan agar melaksanakan fasilitasi penggalian data dari OPD terkait sebagai bahan updating data profil

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) koordinasi yang intensif dengan stake holder dan OPD terkait urusan kewilayahan (2) kerjasama dan koordinasi yang sinergi dengan OPD selaku penyedia dan penyusun data capaian kinerja
- Faktor penghambat pencapaian kinerja:
 - (1) Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap data dukung IKK LPPD sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 sehingga belum menjadikan prioritas pencapaian IKK oleh Perangkat Daerah
 - (2) Masih lemahnya monev berjenjang di Perangkat Daerah atas penyajian data capaian kinerja yang bersifat strategis
 - (3) Perbedaan persepsi antara Kemendagri dengan Pemerintah Daerah terkait pengaturan LKK Posyandu

Sehingga perlu upaya-upaya perbaikan guna mencapai target tahun 2025 dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- (1) Tim Penyusun LPPD Kota Blitar agar mempedomani standar kebenaran data dukung yang diatur dalam juknis/juklak EPPD agar data dukung IKK valid, handal dan dapat dipertanggung jawabkan
- (2) Mengintegrasikan IKK seluruh Perangkat Daerah pada waktu penyusunan dokumen pohon kinerja yangmana sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek
- (3) Membangun sistem pengukuran kinerja secara periodik (triwulan/semester) serta memperkuat koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah dalam memenuhi data pendukung

- (4) Melaksanakan koordinasi lintas Kementerian dengan lintas OPD terkait LKK Posyandu Bidang Kesehatan

2. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Mengampu 2 (dua) Program yakni Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Program Perekonomian dan Pembangunan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 36,11%. Pencapaian kinerja ini disebabkan oleh :

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja adalah koordinasi yang baik dengan perangkat daerah maupun lintas sektor
- Faktor penghambat pencapaian kinerja yakni:
 - (1) Belum optimalnya komitmen bersama dan persamaan persepsi antar stakeholder terkait implementasi kebijakan bidang keagamaan
 - (2) Belum optimalnya komitmen bersama dan persamaan persepsi antar stakeholder terkait implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat
 - (3) Belum adanya peta kebijakan kesejahteraan rakyat yang bisa mendukung langsung pencapaian tujuan kesejahteraan sosial dan masyarakat

Sehingga perlu upaya-upaya perbaikan guna mencapai target selama tahun 2025 dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- (1) Menyusun dan memonev rumusan kebijakan bidang bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat masyarakat secara berkala
- (2) Mensosialisasikan kebijakan yang mendukung pembinaan mental spiritual masyarakat dan kesejahteraan rakyat
- (3) Koordinasi lintas sektor atau antar stakeholder yang intensif guna penguatan komitmen dan penyamaan persepsi terkait implementasi kebijakan bidang keagamaan dan kesejahteraan rakyat

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
 - (1) Langkah-langkah revitalisasi struktur dan kultural manajemen BUMD (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar)
 - (2) Potensi UKM, IKM dan Ekraf Kota Blitar cukup menjadi modal dan didukung dengan agenda Kota Blitar tahunan (event) yang semakin digiatkan oleh Perangkat Daerah pelaksana
 - (3) Koordinasi yang baik dengan lintas OPD dan lintas sektor anggota TPID Kota Blitar
 - (4) Koordinasi yang baik dengan lintas sektor, terutama dengan Bagian SDA Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur dan Bea Cukai Blitar
- Faktor penghambat pencapaian kinerja:
 - (1) Perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang memerlukan penyesuaian pelaksanaan perencanaan dan pelaporan DBHCHT
 - (2) Kurang optimalnya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Sehingga pada tribulan selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah percepatan dalam:

- (1) Melakukan percepatan restrukturisasi melalui penetapan Organ BUMD dengan penguatan komitmen melalui perjanjian kinerja dan penerapan ketentuan Perda yang menjadi dasar penyelenggaraan BUMD
- (2) Optimalisasi Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

3. Bagian Hukum

Mengampu 1 (satu) Program yakni Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan capaian kinerja program sebesar 100,00% sesuai target yang ditetapkan pada tribulan 1. Pencapaian kinerja ini disebabkan oleh:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
 - (1) Komitmen personil pelaksana yang sangat baik
 - (2) Adanya penambahan personil dalam pelaksanaan pencapaian kinerja organisasi
 - (3) Koordinasi yang dilaksanakan secara rutin dengan stakeholder terkait
- Faktor penghambat pencapaian kinerja:
 - (1) Dinamisnya peraturan perundangan yang menuntut percepatan harmonisasi produk hukum daerah
 - (2) Adanya perubahan regulasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga proses pengajuan produk hukum (Perda dan Perkada) membutuhkan waktu yang cukup lama

Sehingga guna mencapai target 2025 maka perlu dilakukan upaya-upaya antara lain :

- (1) melaksanakan penjadwalan ulang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan
- (2) melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat proses penyusunan Perda

4. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Mengampu 1 (satu) Program yakni Program Perekonomian dan Pembangunan dengan capaian kinerja program sebesar 13,02%. Pencapaian kinerja ini disebabkan oleh :

a. Program Perekonomian dan Pembangunan

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
 - (1) Tata kelola penyusunan kebijakan dan pengadaan barang/jasa yang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - (2) Koordinasi antar lembaga baik vertikal maupun antar OPD intensif dilaksanakan
- Faktor penghambat pencapaian kinerja:
 - (1) Terdapat Inpres No 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran sehingga APBD mengalami perubahan dan OPD harus menyesuaikan paket pengadaan pada aplikasi SIRUP LKPP
 - (2) Terdapat kebijakan penggunaan Katalog Elektronik V.6 dan penonaktifan Katalog V.5 sehingga pengadaan barjas secara e

purchasing agak terhambat karena menyesuaikan diri dengan regulasi yang ada

- (3) Aplikasi E-Monev belum dapat terintegrasi dengan SIPD RI, sehingga Realisasi Pengadaan Barang/Jasa belum dapat dipantau secara Real Time
- (4) OPD belum tertib mencatatkan realisasi PBJ pada aplikasi LPSE dan Katalog Elektronik

Sehingga membutuhkan langkah-langkah perbaikan :

- (1) Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait guna perumusan kebijakan administrasi pembangunan.
- (2) Melaksanakan Bimbingan Teknik Katalog Elektronik V. 6 kepada pelaku pengadaan dan penyedia
- (3) Melakukan pemeliharaan dan upgrade aplikasi e-monev.
- (4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi RUP, realisasi PBJ pada LPSE dan realisasi PDN secara berkala.

5. Bagian Organisasi

Mengampu 1 (satu) Program yakni Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja program sebesar 117,88%. Pencapaian kinerja ini disebabkan oleh :

a. Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
 - (1) Meningkatnya pemahaman PD terhadap indikator PEKPPP dan penilaian kepatuhan oleh Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur
 - (2) Telah difasilitasi 2 (dua) pembinaan ketatalaksanaan yakni monev Tata Naskah Dinas dan Pakaian Dinas
 - (3) Telah dilaksanakan monev tindak lanjut SKM tahun 2024 dan pemanfaatan aplikasi e-sukma tahun 2025
 - (4) Telah dilaksanakan rapat teknis antara tim SAKIP Pemerintah Kota Blitar dengan tim IT guna perbaikan pengembangan aplikasi SAKIP
 - (5) Masing-masing PD memahami konsepsi perencanaan, pengukuran target kinerja serta implementasi SAKIP berdasarkan Permenpan 88 Tahun 2021
 - (6) Meningkatnya pemahaman PD atas implementasi RB General dan RB Tematik
 - (7) Telah dilaksanakan penyusunan peta jabatan dan sosialisasi kelas jabatan
- Faktor penghambat pencapaian kinerja:
 - (1) Beberapa OPD belum maksimal memanfaatkan aplikasi e-Sukma
 - (2) Masih ada beberapa OPD yang belum melaksanakan FKP
 - (3) Temuan Umum dan Rekomendasi Tahun 2024 terhadap implementasi SAKIP yakni cross-cutting yang dihasilkan belum terintegrasi dengan SOP serta TLHE SAKIP belum sepenuhnya menunjukkan peningkatan implementasi SAKIP dan belum dimanfaatkan secara optimal
 - (4) Sampai dengan TB 1 tahun 2025 belum diterbitkan aturan implementasi RB yang baru atau Road Map RB 2025-2030 oleh Kemenpan RB
 - (5) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi sistem kerja Perangkat Daerah dikarenakan keterbatasan SDM

- (6) Terjadinya disparitas jabatan fungsional pasca terbitnya Permenpan RB Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

Sehingga guna pencapaian target tahun 2025, pada tribulan berikutnya perlu dilakukan strategi percepatan pencapaian target yakni melalui :

- (1) Diadakan monev e-Sukma per tribulan
- (2) Sosialisasi kewajiban pelaksanaan FKP
- (3) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi dalam aplikasi yang terintegrasi
- (4) Menyusun SOP yang mengintegrasikan cross cutting didalamnya
- (5) Menyusun bahan Road Map RB 2025-2030
- (6) Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sistem kerja Perangkat Daerah dengan mengevaluasi kualitas dan kuantitas Tim kerja

6. Bagian Umum

Mengampu 1 (satu) Program yakni Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja program sebesar 99,41%. Pencapaian kinerja ini disebabkan oleh :

a. Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
 - (1) Komitmen personil pelaksana yang sangat baik dalam pencapaian kinerja
 - (2) Pelaksanaan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan sesuai dengan standar
 - (3) Pemberian layanan kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku
- Faktor penghambat pencapaian kinerja:
 - (1) Dari 9 unsur SKM di lingkup Sekretariat Daerah dengan 3 nilai terendah yakni produk spesifikasi jenis pelayanan, waktu layanan dan prosedur
 - (2) Belum terintegrasinya manajemen data di internal Setda
 - (3) Perlunya adaptasi peningkatan layanan persuratan dan arsip melalui aplikasi SRIKANDI

Sehingga perlu ditindaklanjuti dengan upaya-upaya:

- (1) Pada tribulan berikutnya perlu untuk dilakukan reviu SOP dan SP sesuai dengan Hasil SKM dan diupayakan melalui FKP (Forum Konsultasi Publik)
- (2) Mengintegrasikan sistem manajemen data di internal Setda
- (3) Memfasilitasi bimtek dan sosialisasi lebih intensif kepada arsiparis dan para pejabat guna meningkatkan penggunaan layanan persuratan dan arsip melalui aplikasi SRIKANDI

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu disusun rencana kerja dan pendanaan dengan memakai kaidah dan indikator yang spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya misinterpretasi, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan serta fleksibel terhadap perubahan.

Mengacu pada prioritas nasional tahun 2025 yang diampu oleh Sekretariat Daerah yakni “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Dan Transformasi Pelayanan Publik” serta melihat isu strategis dan capaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2024, maka kebijakan dan strategi pembangunan yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah meliputi:

1. Transformasi Sosial

Dengan mengeluarkan kebijakan, fasilitasi, pembinaan dan monev terhadap peningkatan akses kesehatan untuk semua, peningkatan akses pendidikan berkualitas yang merata, serta perlindungan sosial yang adaptif

2. Transformasi Ekonomi

Dengan mengeluarkan kebijakan, fasilitasi, pembinaan dan monev terhadap pelaksanaan inovasi dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau, transformasi ekonomi digital, integrasi ekonomi domestik, serta perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

3. Transformasi Tata Kelola

Dengan mengeluarkan kebijakan, fasilitasi, pembinaan dan monev terhadap penguatan tata kelola regulasi, pengembangan dan pemanfaatan jejaring kerjasama antar lembaga, digitalisasi pelayanan publik, perluasan akses pelayanan publik, pemantauan pelayanan publik pemerintah, penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah, penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional, transformasi budaya kerja ASN, penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, penguatan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Dengan mengeluarkan kebijakan, fasilitasi, pembinaan dan monev terhadap pembangunan bidang hukum dan bidang demokrasi

5. Ketahanan Sosial Budaya

Dengan mengeluarkan kebijakan, fasilitasi, pembinaan dan monev terhadap penguatan beragama maslahat dan layanan keagamaan transformatif, penguatan karakter bangsa dan pemajuan kebudayaan serta perwujudan masyarakat inklusif

Guna mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut, menyesuaikan hasil monitoring evaluasi pencapaian kinerja sampai dengan tribulan I tahun 2025, serta menindaklanjuti rekomendasi atas capaian kinerja tahun 2024 pada dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah maka perubahan rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 yang diturunkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja, penyebaran lokasi, sumber dan kebutuhan dana/pagu indikatif dapat dijelaskan pada tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Blitar
Tahun 2025

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2025		Keterangan
				Sebelum	Sesudah	
	TUJUAN:					
I	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) diukur melalui 4 indikator: 1) Toleransi Toleransi merupakan sikap saling mengizinkan dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan 2) Kesetaraan Kesetaraan memandang bahwa setiap manusia dilahirkan setara, meskipun memiliki keragaman identitas baik dari suku, bangsa, agama, dan sebagainya. 3) Kerjasama Kerjasama merupakan perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab dan merasa senasib sepenanggungan. 4) Peran Pemerintah Peran pemerintah merupakan upaya intervensi pemerintah dalam kegiatan atau sisi-sisi keagamaan masyarakatnya	85,155	85,54	Perubahan target tahun 2025 disebabkan capaian IKUB 2024 sudah melampaui target awal tahun 2025 sebesar 85,49

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2025		Keterangan
				Sebelum	Sesudah	
	SASARAN:					
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat atau pengguna kebijakan	100%	100%	
	TUJUAN:					
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	BB (74,8)	BB (80,11)	Perubahan target tahun 2025 disebabkan capaian Nilai SAKIP 2024 sudah melampaui target awal tahun 2024 sebesar 80,06
		Persentase Kepala PD yang paham atas penerapan “Good Governance”	“Good governance” atau tata kelola yang baik pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara	33,33%	33,33%	
	SASARAN:					
1	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas	Penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi meliputi penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik	86,21%	86,21%	

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2025		Keterangan
				Sebelum	Sesudah	
		dan peningkatan kualitas pelayanan publik)				
	TUJUAN:					
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Status EKPPD	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sedang (3,3425)	Sedang (3,3672)	Perubahan target tahun 2025 disebabkan capaian Status EKPPD 2024 sudah melampaui target awal tahun 2025 sebesar 3,3670
	SASARAN:					
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat atau pengguna kebijakan	100%	100%	
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat atau pengguna kebijakan	100%	100%	
	TUJUAN:					
III	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan	Baik (85,605)	Baik (89,28)	Perubahan target tahun 2025 disebabkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 sudah melampaui target awal tahun 2025 sebesar 89,23

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2025		Keterangan
				Sebelum	Sesudah	
		Persentase PD yang telah mempunyai inovasi pelayanan publik terintegrasi	Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat/ pengguna layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung	25%	25%	
	SASARAN:					
1	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase PD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Hasil analisa Survey Kepuasan Masyarakat perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Penentuan perbaikan harus direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan)	100%	100%	
		Nilai rata - rata SKM Setda	Nilai rata-rata hasil Survey Kepuasan Masyarakat atau IKM terhadap kualitas layanan Sekretariat Daerah	Sangat Baik (89,00)	Sangat Baik (89,00)	
		Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat/ pengguna layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.	25%	39,13%	Perubahan target tahun 2025 disebabkan Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik 2024 sudah melampaui target awal tahun 2025 sebesar 39,13%
	TUJUAN:					

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2025		Keterangan
				Sebelum	Sesudah	
IV	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	A (89,00)	A (89,00)	
	SASARAN:					
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	A (89,00)	A (89,00)	

Tabel 3.2
Rencana Tindak Lanjut LKj IP Tahun 2024 pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan keagamaan	Meningkatkan koordinasi serta penyamaan persepsi antar lintas sektor terkait implementasi kebijakan bidang keagamaan melalui upaya: ✓ Menyusun dan memonev rumusan kebijakan bidang bina mental spiritual masyarakat secara berkala ✓ Mensosialisasikan kebijakan yang mendukung pembinaan mental spiritual masyarakat ✓ Koordinasi lintas sektor atau antar stakeholder yang intensif guna penguatan komitmen dan penyamaan persepsi terkait implementasi kebijakan bidang keagamaan	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan perekonomian	Melakukan sosialisasi Perubahan Perwali RT Keren	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan - Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
		✓ Melaksanakan persewaan aset menggunakan SE Juknis	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
		✓ Melaksanakan evaluasi pengaturan LKK dalam 3 bulan kedepan (tribulan 1 tahun 2025) sebagai bahan reviu apabila tidak sesuai dengan kondisi	- Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
		✓ Menunggu Perwali Posyandu berproses pelaksanaan LKK Posyandu menggunakan SE Juknis	
		Pemindahan ibu kota Kecamatan Sukorejo ke Kelurahan Pakunden, tentunya harus ditetapkan dalam peraturan daerah	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan - Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan
		✓ Lebih intensif melakukan koordinasi kepada instansi vertikal sebagai Pembina Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat serta meningkatkan koordinasi lintas OPD guna memfasilitasi perumusan kebijakan yang menjadi kewenangannya meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB serta Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
		✓ Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan yang mendukung kegiatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
		✓ Melakukan percepatan restrukturisasi melalui penetapan Organ BUMD dengan penguatan komitmen melalui perjanjian kinerja dan penerapan ketentuan Perda yang menjadi dasar penyelenggaraan BUMD	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
		✓ Optimalisasi Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	
3	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pembangunan serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Melakukan pemeliharaan dan upgrade aplikasi e-monev	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi RUP, realisasi PBJ pada LPSE dan realisasi PDN secara berkala	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait guna perumusan kebijakan administrasi pembangunan.	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
		Kebijakan pembatasan waktu pengembalian Hasil Revisi Dokumen persiapan pemilihan penyedia oleh OPD sesuai dengan SOP Pengadaan Barjas	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Memilah dan merekap paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan yang berkedudukan di UKPBJ sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan pada Rencana Umum Pekerjaan.	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Memproses pekerjaan/paket pengadaan sesuai dengan urutan jadwal yang telah dientry pada SIRUP LKPP.	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
		Melakukan asistensi Reviu RUP dan membatasi permohonan pembukaan hak akses RUP bagi OPD	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
4	Memperkuat internalisasi kinerja organisasi	Melakukan pendampingan secara intensif terhadap Perangkat Daerah pengampu dan pendukung RB dengan mengutamakan dampak serta kolaborasi dalam menyusun rencana aksi dan pelaksanaan RB termasuk didalamnya	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
		penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik	- Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah - Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		✓ Melaksanakan pembinaan pelayanan publik setiap 3 (tiga) bulan sekali meliputi monev SOP, SP, maklumat pelayanan dan pelaksanaan aturan ketatalaksanaan seperti Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas, SPBE	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		✓ Menerbitkan regulasi 1 perangkat daerah wajib menciptakan 1 atau 2 inovasi setiap tahun	
		✓ Melakukan pembinaan rutin setiap tribulan untuk memonev pelaksanaan inovasi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja	
5	Meningkatkan kualitas pelayanan publik internal Perangkat Daerah	Perbaikan dari unsur sarana prasarana, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana dijadwalkan pada TB IV tahun 2025 dan tahun 2026 oleh Bagian Umum	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Perbaikan dari unsur waktu penyelesaian pelayanan, perilaku pelaksana dan prosedur	- Program: Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
		dijadwalkan pada TB II tahun 2025 oleh Bagian Pemerintahan	- Kegiatan: Administrasi Tata Pemerintahan - Sub Kegiatan: Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
		Perbaikan dari unsur sarana prasarana, waktu penyelesaian pelayanan dan produk spesifikasi dijadwalkan pada TB II-IV tahun 2025 oleh Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Perbaikan dari unsur persyaratan, waktu penyelesaian pelayanan dan prosedur dijadwalkan pada TB II tahun 2025 oleh Bagian Hukum	- Program: Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat - Kegiatan: Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
		Perbaikan dari unsur sarana prasarana, prosedur dan kompetensi pelaksana dijadwalkan pada TB II dan IV tahun 2025 oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
		Perbaikan dari unsur persyaratan, waktu penyelesaian pelayanan dan prosedur dijadwalkan pada TB II tahun 2025 oleh Bagian Organisasi	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
			- Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah - Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
6	Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Menyusun SOP yang mengintegrasikan crosscutting didalamnya	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Menyusun tindak lanjut rekomendasi monitoring pencapaian target jangka menengah	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
		Menyusun ranwal renstra yang memuat inovasi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Menyusun rancangan LKj IP 2024 yang menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi, pada dokumen antara lain: (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah (2) Perubahan Perjanjian Kinerja (3) Crosscutting antar Bagian (4) Laporan monev renaksi yang menyajikan penyesuaian strategi dan arah kebijakan dan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
		bukti tindak lanjut atas rekomendasi monev renaksi	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tabel 3.3
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025 yang mengalami Perubahan

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
						BAGIAN PEMERINTAHAN						
2	13	04				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	85,71 persen	85,71 persen			
2	13	04	2	01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	20 kelurahan	20 kelurahan			
2	13	04	2	01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	21 dokumen	21 dokumen	196.636.270	22.000.000	Anggaran berkurang sebesar Rp. 174.636.270 dilatarbelakangi tidak lolosnya Lomba Kelurahan sehingga dialihkan pada aktifitas Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
4	01	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen			
							Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100 persen	100 persen			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
4	01	02	2	01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	100 persen	100 persen			
							Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 persen	100 persen			
							Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	100 persen	100 persen			
							Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	100 persen	100 persen			
4	01	02	2	01	001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	10 Dokumen	562.638.900	315.512.500	Anggaran berkurang sebesar Rp. 247.126.400 dilatarbelakangi adanya efisiensi pada rekening bahan cetak, mamin rapat dan perjalanan dinas
4	01	02	2	01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 dokumen	5 dokumen	858.664.700	1.010.453.490	Anggaran bertambah sebesar Rp. 151.788.790 untuk fasilitasi rangkaian kegiatan

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
												Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping KaryaMas serta kelengkapan atribut Posyandu 6 (enam) SPM Pelayanan Dassr
4	01	02	2	01	003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 dokumen	4 dokumen	704.007.300	448.402.700	Anggaran berkurang sebesar Rp. 255.604.600 dilatarbelakangi adanya efisiensi pada rekening bahan cetak, mamin rapat dan perjalanan dinas
4	01	02	2	04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	83,33 persen	83,33 persen			
4	01	02	2	04	001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	8 Dokumen	8 Dokumen	233.608.700	148.568.200	Anggaran berkurang sebesar Rp. 85.040.500 dilatarbelakangi adanya efisiensi pada rekening bahan cetak dan mamin rapat.
						BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
4	01	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti</i>	100 persen	100 persen			
4	01	02	2	02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<i>Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti</i>	6 rumusan kebijakan	6 rumusan kebijakan			
							<i>Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti</i>	4 rumusan kebijakan	4 rumusan kebijakan			
4	01	02	2	02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>	25 dokumen	25 dokumen	8.979.252.900	8.607.276.405	Anggaran berkurang sebesar Rp. 371.976.495 guna efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025.
4	01	02	2	02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	<i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,</i>	2 dokumen	2 dokumen	122.240.900	52.496.100	Anggaran berkurang sebesar Rp. 69.744.800 guna efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025.

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
							<i>Pengendalian Penduduk dan KB</i>					
4	01	02	2	02	003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas</i>	2 dokumen	2 dokumen	95.333.400	41.765.400	Anggaran berkurang sebesar Rp. 53.568.000 guna efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025.
4	01	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti</i>	100 persen	100 persen			
4	01	03	2	01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	<i>Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti</i>	6 rumusan kebijakan	6 rumusan kebijakan			
4	01	03	2	01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</i>	2 dokumen	2 dokumen	215.867.767	188.295.974	Anggaran berkurang sebesar Rp. 27.571.793 guna efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025.
4	01	03	2	01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</i>	2 Laporan	2 Laporan	218.140.000	78.927.230	Anggaran berkurang sebesar Rp. 139.212.770 guna efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025.

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
4	01	03	2	01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	<i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</i>	4 dokumen	4 dokumen	183.786.800	44.926.000	Anggaran berkurang sebesar Rp. 138.860.800 guna efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025.
4	01	03	2	04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	<i>Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti</i>	2 dokumen	2 dokumen			
4	01	03	2	04	001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja</i>	2 dokumen	2 dokumen	200.000.000	1.353.275.148	Anggaran bertambah sebesar Rp. 1.153.275.148 merupakan anggaran SILPA DBHCHT 2024 yang didistribusikan ke OPD pengelola DBHCHT pada waktu Perubahan Anggaran 2025
						BAGIAN HUKUM						
4	01	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi</i>	100 persen	100 persen			
4	01	02	2	03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<i>Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana</i>	100 persen	100 persen			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
4	01	02	2	03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	320 dokumen	320 dokumen	221.168.200	173.605.840	Anggaran berkurang sebesar Rp. 47.562.360 guna efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
4	01	02	2	03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 kasus	4 kasus	190.013.500	207.425.900	Anggaran bertambah sebesar Rp. 17.412.400 untuk kegiatan sosialisasi bantuan hukum dengan menghadirkan narasumber Aparat Penegak Hukum
4	01	02	2	03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	70 dokumen	70 dokumen	248.958.000	203.009.100	Anggaran berkurang sebesar Rp. 45.948.900 guna efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
						BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA						
4	01	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
4	01	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	76,77 persen	76,77 persen			
4	01	03	2	02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100 persen	100 persen			
							Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	10 bahan kebijakan	10 bahan kebijakan			
4	01	03	2	02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	46.413.400	19.668.000	Anggaran berkurang sebesar Rp. 26.745.400 guna efisiensi ATK sesuai Inpres No 1 Tahun 2025.
4	01	03	2	02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	16 laporan	16 laporan	103.184.400	90.688.400	Anggaran berkurang sebesar Rp. 12.496.000 guna efisiensi Perjalanan Dinas sesuai Inpres No 1 Tahun 2025.
4	01	03	2	03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	SKM Layanan UKPBJ	BAIK (83) Nilai	BAIK (83,90) Nilai			Realisasi SKM Layanan PBJ tahun 2024 telah melebihi target 2025 sebesar 83,85
							Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang	7 Nilai	7 Nilai			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
							<i>telah mencapai Level 3 (Proaktif)</i>					
4	01	03	2	03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	80 dokumen	19 dokumen	238.765.100	196.697.175	- Anggaran berkurang sebesar Rp. 42.067.925 guna efisiensi Perjalanan Dinas dan ATK sesuai Inpres No 1 Tahun 2025. - Penyesuaian target tahun 2025 dilatarbelakangi perubahan kebijakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa (sesuai Perpres Nomor 46 tahun 2025)
4	01	03	2	03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaaan Secara Elektronik	<i>Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>	2 dokumen	2 dokumen	111.942.200	109.307.614	Anggaran berkurang sebesar Rp. 2.634.586 guna efisiensi ATK sesuai Inpres No 1 Tahun 2025.
4	01	03	2	03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan</i>	300 orang	300 orang	138.664.000	74.626.500	Anggaran berkurang

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
							<i>Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>					sebesar Rp. 64.037.500 guna efisiensi Perjalanan Dinas dan mamin sesuai Inpres No 1 Tahun 2025.
						BAGIAN ORGANISASI						
4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	SANGAT BAIK (89) Nilai	SANGAT BAIK (89) Nilai			
							<i>Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik</i>	41,38 persen	56,67 persen			Perubahan target tahun 2025 disebabkan Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik TB 1 2025 sudah melampaui target awal tahun 2025 sebesar 56,67%
							<i>Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi</i>	86,21 persen	86,21 persen			
4	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu</i>	100 persen	100 persen			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
4	01	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	10.054.000	7.854.000	Anggaran berkurang sebesar Rp. 2.200.000 guna efisiensi dan menyesuaikan standar ASB (analisis standar biaya)
4	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	100 persen	100 persen			
4	01	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 paket	6 paket	29.865.400	26.250.000	Anggaran berkurang sebesar Rp. 3.615.400 guna efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025.
4	01	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	84 orang	106 orang	88.314.600	60.550.000	Anggaran berkurang sebesar Rp. 27.764.600 guna efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025.
4	01	01	2	13		Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	26 OPD	26 OPD			
4	01	01	2	13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 dokumen	6 dokumen	182.878.800	169.557.900	Anggaran berkurang sebesar Rp. 13.320.900

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
												guna efisiensi perjalanan dinas sesuai Inpres No 1 Tahun 2025.
4	01	01	2	13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 laporan	5 laporan	334.013.100	230.039.812	Anggaran berkurang sebesar Rp. 103.973.288 guna efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025.
4	01	01	2	13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 dokumen	3 dokumen	199.571.500	171.577.003	Anggaran berkurang sebesar Rp. 27.994.497 guna efisiensi perjalanan dinas dan mamin sesuai Inpres No 1 Tahun 2025.
4	01	01	2	13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 dokumen	3 dokumen	16.794.000	5.000.000	Anggaran berkurang sebesar Rp. 11.794.000 guna efisiensi dan digeser ke honor narasumber pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
												Publik dan Tata Laksana
4	01	01	2	13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 dokumen	2 dokumen	13.308.000	8.168.300	Anggaran berkurang sebesar Rp. 5.139.700 guna efisiensi mamin sesuai Inpres No 1 Tahun 2025.
						BAGIAN UMUM						
4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	100 persen	100 persen			
4	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 persen	100 persen			
4	01	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	9 laporan	1.100.000	72.626.275	- Anggaran bertambah Rp. 71.526.275 dialokasikan untuk belanja jasa Jasa konsultan penelaah kebijakan (Mei - Desember) - 9 laporan terdiri dari 1 laporan SKM Tahun 2025 dan 8 laporan

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
												hasil telaahan kebijakan oleh Konsultan
4	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 persen	100 persen			
4	01	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 orang/bulan	106 orang/bulan	14.295.898.327	14.589.370.064	Anggaran bertambah sebesar Rp. 293.471.737 untuk mencukupi kekurangan gaji karena adanya penambahan jumlah ASN Setda
4	01	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 laporan	4 laporan	3.850.000	1.650.000	Anggaran berkurang sebesar Rp. 2.200.000 menyesuaikan kebijakan efisiensi
4	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	100 persen	100 persen			
4	01	01	2	03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2.750.000	2.200.000	Anggaran berkurang sebesar Rp. 550.000 menyesuaikan

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
												kebijakan efisiensi
4	01	01	2	04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	100 persen	100 persen			
4	01	01	2	04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Retribusi Daerah	1 dokumen	0 dokumen	700.000	0	Anggaran berkurang sebesar Rp. 700.000 menyesuaikan kebijakan efisiensi
4	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 persen	100 persen			
4	01	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4 paket	47.912.200	75.885.391	Anggaran bertambah sebesar Rp. 27.973.191
4	01	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	7 paket	108.346.900	89.518.200	Anggaran berkurang sebesar Rp. 18.828.700 menyesuaikan kebijakan efisiensi
4	01	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	3 paket	31.781.900	30.922.300	Anggaran berkurang sebesar Rp. 859.600 dialihkan untuk pembelian lampu esensial

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
4	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	170 paket	170 paket	773.355.000	730.852.430	Anggaran berkurang sebesar Rp. 42.502.570 menyesuaikan kebijakan efisiensi
4	01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 paket	2 paket	43.698.700	26.893.800	Anggaran berkurang sebesar Rp. 16.804.900 menyesuaikan kebijakan efisiensi (dialihkan untuk pembelian komponen instalasi listrik)
4	01	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	24 dokumen	24 dokumen	48.600.000	66.675.000	Anggaran bertambah sebesar Rp. 18.075.000 menyesuaikan dengan kenaikan harga satuan
4	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	130 laporan	130 laporan	382.721.700	322.767.500	Anggaran berkurang sebesar Rp. 59.954.200 guna menyesuaikan kebijakan efisiensi

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
												(dialihkan untuk pembelian BBM pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)
4	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 persen	100 persen			
4	01	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	10 unit	22.205.800	567.330.450	Anggaran bertambah sebesar Rp. 545.124.650 dialokasikan untuk penambahan pembelian AC, Proyektor dan Mebel (meja kursi kerja) atau dengan jenis yang sama dengan sebelumnya

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
4	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>	100 persen	100 persen			
4	01	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	48 laporan	48 laporan	864.885.000	1.161.198.462	Anggaran bertambah sebesar Rp. 296.313.462 menyesuaikan kebutuhan pembayaran listrik
4	01	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	6 laporan	7 laporan	12.000.000	30.000.553	Anggaran bertambah sebesar Rp. 18.000.553 dialokasikan untuk pemeliharaan jok / sofa kendaraan dinas
4	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	13 laporan	13 laporan	3.191.130.000	3.552.593.060	Anggaran bertambah sebesar Rp. 361.463.060 dialokasikan untuk penambahan THL (tenaga administrasi)
4	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar</i>	100 persen	100 persen			
4	01	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau</i>	2 unit	7 unit	455.618.700	429.184.208	- Anggaran berkurang Rp.

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
						Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>					26.434.492 menyesuaikan dengan kebutuhan - Target menyesuaikan dengan total unit
4	01	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	65 unit	65 unit	495.752.600	573.415.858	Anggaran bertambah sebesar Rp. 77.663.258 dialokasikan untuk pembelian BBM
4	01	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	118 unit	124 unit	163.157.500	190.101.500	Anggaran bertambah sebesar Rp. 26.944.000 menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan kendaraan yang ada
4	01	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 unit	5 unit	347.464.000	1.171.311.999	Anggaran bertambah sebesar Rp. 823.847.999 untuk rehabilitasi rumah dinas KDH/WKDH, rehabilitasi gedung Pemkot, dan rehabilitasi

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
												gedung BKPSDM
4	01	01	2	11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<i>Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	100 persen	100 persen			
4	01	01	2	11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	2 orang/bulan	2 orang/bulan	178.952.314	239.715.981	Anggaran bertambah sebesar Rp. 60.763.667 menyesuaikan dengan kebijakan baru terkait pemberian gaji dan tunjangan KDH/WKDH
4	01	01	2	12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	<i>Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan</i>	100 persen	100 persen			
4	01	01	2	12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>	4 paket	12 paket	1.514.704.900	2.619.984.840	Anggaran bertambah sebesar Rp. 1.105.279.940 dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga KDH baru
4	01	01	2	12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>	4 paket	12 paket	1.282.342.400	1.356.384.296	Anggaran bertambah sebesar Rp. 74.041.896 dialokasikan

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
												untuk kebutuhan rumah tangga WKDH baru
4	01	01	2	12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 paket	12 paket	296.079.200	295.895.800	Anggaran berkurang Rp. 183.400 dialihkan untuk pembelian BBM pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)
4	01	01	2	14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	80 persen	80 persen			
4	01	01	2	14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	33 laporan	33 laporan	717.500.000	1.252.250.605	Anggaran bertambah sebesar Rp. 534.750.605 dialokasikan untuk sewa peralatan umum kegiatan HUT RI dan

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
												sambut Tahun Baru
4	01	01	2	14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	400 laporan	400 laporan	66.471.000	11.700.000	Anggaran berkurang sebesar Rp. 54.771.000 dialihkan untuk aktifitas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
4	01	01	2	14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3055 laporan	3055 laporan	73.197.800	75.635.600	Anggaran berkurang sebesar Rp. 2.437.800 dialihkan untuk aktifitas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan

Tabel 3.4

Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
								Semula	Menjadi	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA 2025 Perubahan				Nasional				Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						BAGIAN PEMERINTAHAN				40.919.124.378,00	42.491.865.753,00	44.354.851.464,00						41.028.550.000,00					
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				196.636.270,00	125.201.570,00	22.000.000,00						110.000.000,00					
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				196.636.270,00	125.201.570,00	22.000.000,00						110.000.000,00					
1	2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	85,71 persen	85,71 persen	196.636.270,00	125.201.570,00	22.000.000,00							110.000.000,00				
	2	13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	20 kelurah an	20 kelurah an	196.636.270,00	125.201.570,00	22.000.000,00				Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Kelurahan yang ada di Kota Blitar		110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	2	13	4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembang an Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	21 Dokume n	21 Dokume n	196.636.270,00	125.201.570,00	22.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				40.722.488.108,00	42.366.664.183,00	44.332.851.464,00						40.918.550.000,00					
	4	1				SEKRETARIAT DAERAH				40.722.488.108,00	42.366.664.183,00	44.332.851.464,00						42.366.664.183,00					
2	4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	12.215.886.500,00	11.791.572.140,00	11.208.515.635,00							11.716.000.000,00				
					Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif		100 persen	100 persen															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA 2025 Perubahan				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4	1	2	2.01		Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	100 persen	100 persen	2.125.310.900,00	1.863.921.100,00	1.774.368.690,00				Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Administrasi Kewilayahan , Kualitas Otoda		1.056.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	100 persen	100 persen												
						Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 persen	100 persen												
						Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	100 persen	100 persen												
	4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokume n	10 Dokume n	562.638.900,00	437.638.900,00	315.512.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			255.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA 2025 Perubahan				Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokume n	5 Dokume n	858.664.700,00	862.712.500,00	1.010.453.490,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			645.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokume n	4 Dokume n	704.007.300,00	563.569.700,00	448.402.700,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			156.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	83,33 persen	83,33 persen	233.608.700,00	233.608.700,00	148.568.200,00				Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Kerjasama dengan Pemerintah Daerah/L embaga/Inst ansi Lain		665.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	8 Dokume n	8 Dokume n	233.608.700,00	233.608.700,00	148.568.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			665.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA 2025 Perubahan				Nasional				Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
						BAGIAN HUKUM			40.919.124.378,00	42.491.865.753,00	44.354.851.464,00						41.028.550.000,00								
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			40.722.488.108,00	42.366.664.183,00	44.332.851.464,00						40.918.550.000,00								
	4	1				SEKRETARIAT DAERAH			40.722.488.108,00	42.366.664.183,00	44.332.851.464,00						40.918.550.000,00								
1	4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	100 persen	100 persen	12.215.886.500,00	11.791.572.140,00	11.208.515.635,00						11.716.000.000,00							
	4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100 persen	100 persen	660.139.700,00	724.859.940,00	584.040.840,00				Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Perangkat Daerah		775.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
	4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																	315.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	320 Dokumen	320 Dokumen	221.168.200,00	221.169.940,00	173.605.840,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				315.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum																			
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	4 Kasus	190.013.500,00	205.313.900,00	207.425.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																			
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	70 Dokumen	70 Dokumen	248.958.000,00	298.376.100,00	203.009.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				185.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025		Nasional		Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	25 Dokumen	25 Dokume n	8.979.252.900,00	8.788.732.900,00	8.607.276.405,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APATAN BAGI HASIL		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			9.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	2 Dokume n	122.240.900,00	105.354.300,00	52.496.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APATAN BAGI HASIL		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	2 Dokume n	95.333.400,00	75.095.200,00	41.765.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PEND APATAN BAGI HASIL		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	1.456.763.667,00	1.298.131.467,00	2.156.412.041,00							1.548.000.000,00	
	4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	6 rumusan kebijakan	6 rumusa n kebijaka n	617.794.567,00	477.907.767,00	312.149.204,00				Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Perusahaan Daerah dan Sektor Perekonomia n di Kota Blitar		640.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokume n	215.867.767,00	238.535.900,00	188.295.974,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PEND APATA N BAGI HASIL		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	218.140.000,00	155.984.267,00	78.927.230,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PEND APATA N BAGI HASIL		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	4 Dokume n	183.786.800,00	83.387.600,00	44.926.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PEND APATA N BAGI HASIL		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			195.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	2 Dokumen	2 Dokume n	200.000.000,00	200.000.000,00	1.353.275.148,00				Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Sumber Daya Alam di Kota Blitar		280.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	2 Dokume n	200.000.000,00	200.000.000,00	1.353.275.148,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan ,Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMB AKAU (CHT)		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			280.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025			Nasional		Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						BAGIAN UMUM			40.919.124.378,00	42.491.865.753,00	44.354.851.464,00							41.028.550.000,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			40.722.488.108,00	42.366.664.183,00	44.332.851.464,00							40.918.550.000,00		
	4	1				SEKRETARIAT DAERAH			40.722.488.108,00	42.366.664.183,00	44.332.851.464,00							40.918.550.000,00		
1	4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/ WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ ketentuan yang berlaku	100 persen	100 persen	27.049.837.941,00	29.276.960.576,00	30.967.923.788,00						27.654.550.000,00		
	4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 persen	100 persen	16.654.000,00	22.954.000,00	85.980.275,00				Peningkatan Pelayanan Pemerintah Berbasis Digital dan Investasi	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar		33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.100.000,00	9.600.000,00	72.626.275,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi		12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 persen	100 persen	14.299.748.327,00	14.593.206.121,00	14.591.020.064,01				Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.009.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025				Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	14.295.898.327,00	14.589.357.121,00	14.589.370.064,01	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			13.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	3.850.000,00	3.849.000,00	1.650.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			9.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	100 persen	100 persen	4.950.000,00	4.950.000,00	4.400.000,00				Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.750.000,00	2.750.000,00	2.200.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			5.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			4.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas									
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025				Nasional		Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	4	1	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	100 persen	100 persen	700.000,00	700.000,00				Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah		1.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH						
	4	1	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																1.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokume n	700.000,00	700.000,00		Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			1.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
	4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 persen	100 persen	1.436.416.400,00	1.511.387.691,00	1.343.514.621,00				Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah		1.690.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
	4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		1.690.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	47.912.200,00	49.898.791,00	75.885.391,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
	4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	108.346.900,00	106.445.900,00	89.518.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			205.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
	4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		205.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	31.781.900,00	30.922.300,00	30.922.300,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum- Dana		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			41.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2025		APBD 2025	RENJA Perubahan 2025	Nasional				Daerah		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														Alokasi Umum							
	4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	170 Paket	170 Paket	773.355.000,00	654.627.000,00	730.852.430,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			819.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	43.698.700,00	43.698.700,00	26.893.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokume n	48.600.000,00	66.675.000,00	66.675.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	130 Laporan	382.721.700,00	559.120.000,00	322.767.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			410.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025				Nasional				Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
		4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 persen	100 persen	22.205.800,00	184.511.935,00	567.330.450,00				Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		90.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
		4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																90.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	22.205.800,00	184.511.935,00	567.330.450,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			90.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
		4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 persen	100 persen	4.068.456.000,00	4.777.970.118,00	4.744.233.075,00				Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah		4.431.450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
		4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	441.000,00	441.000,00	441.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
		4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	864.885.000,00	1.221.634.461,00	1.161.198.462,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
		4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025				Nasional				Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	12.000.000,00	30.000.553,00	30.000.553,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			31.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	3.191.130.000,00	3.525.894.104,00	3.552.593.060,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			3.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 persen	100 persen	1.461.992.800,00	1.515.110.930,00	2.364.013.565,99				Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.648.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	455.618.700,00	440.248.108,00	429.184.208,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			456.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	65 Unit	495.752.600,00	573.421.322,00	573.415.858,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			504.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	118 Unit	118 Unit	163.157.500,00	185.027.500,00	190.101.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			238.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	3 Unit	3 Unit	347.464.000,00	316.414.000,00	1.171.311.999,99	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 persen	100 persen	923.673.914,00	984.437.581,00	984.437.581,00				Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Administrasi keuangan dan operasional KDH WKDH		936.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	2Orang/ Bulan	178.952.314,00	239.715.981,00	239.715.981,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	23 Paket	23 Paket	138.721.600,00	138.721.600,00	138.721.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025				Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	296.079.200,00	295.895.800,00	295.895.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	80 persen	80 persen	857.168.800,00	1.162.562.320,00	1.339.586.205,00				Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Protokol dan Komunikasi Pimpinan		1.733.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	33 Laporan	33 Laporan	717.500.000,00	1.087.664.520,00	1.252.250.605,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			1.460.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	400 Laporan	400 Laporan	66.471.000,00	1.700.000,00	11.700.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			78.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
							Jumlah Laporan Pendokumentasi an Tugas Pimpinan	3055 Laporan	3055 Laporan	73.197.800,00	73.197.800,00	75.635.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			195.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						BAGIAN ORGANISASI			40.919.124.378,00	42.491.865.753,00	44.354.851.464,00					41.028.550.000,00				
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			40.722.488.108,00	42.366.664.183,00	44.332.851.464,00					40.918.550.000,00				
	4	1				SEKRETARIAT DAERAH			40.722.488.108,00	42.366.664.183,00	44.332.851.464,00					40.918.550.000,00				
1	4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	SANGAT BAIK (89) 41,38 86,21 Nilai persen persen	SANGAT BAIK (89) 41,38 86,21 Nilai persen persen	27.049.837.941,00	29.276.960.576,00	30.967.923.788,00						27.654.550.000,00		
	4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	100 persen	100 persen	16.654.000,00	22.954.000,00	85.980.275,00				Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10.054.000,00	7.854.000,00	7.854.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025				Nasional		Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	100 persen	100 persen	118.180.000,00	114.940.600,00	86.800.000,00			Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar		152.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	6 Paket	29.865.400,00	26.664.800,00	26.250.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			66.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		4	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	84 Orang	84 Orang	88.314.600,00	88.275.800,00	60.550.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			86.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025				Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	26 OPD	26 OPD	746.565.400,00	662.004.600,00	584.343.015,00				Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Perangkat Daerah		685.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	6 Dokumen	182.878.800,00	169.862.900,00	169.557.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	5 Laporan	334.013.100,00	277.312.270,00	230.039.812,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	3 Dokumen	199.571.500,00	191.521.430,00	171.577.003,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	3 Dokumen	16.794.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil		P Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	13.308.000,00	13.308.000,00	8.168.300,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA			40.919.124.378,00	42.491.865.753,00	44.354.851.464,00					41.028.550.000,00				
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			40.722.488.108,00	42.366.664.183,00	44.332.851.464,00					40.918.550.000,00				
	4	1				SEKRETARIAT DAERAH			40.722.488.108,00	42.366.664.183,00	44.332.851.464,00					40.918.550.000,00				
1	4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E- Procurement Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	76,67 100 persen persen	76,67 100 persen persen	1.456.763.667,00	1.298.131.467,00	2.156.412.041,00						1.548.000.000,00		
	4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	10 bahan kebijakan	10 bahan kebijakan	149.597.800,00	122.852.400,00	110.356.400,00				Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Perangkat Daerah		163.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	46.413.400,00	19.668.000,00	19.668.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			38.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	16 Laporan	16 Laporan	103.184.400,00	103.184.400,00	90.688.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi Digital dan Investasi			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif) SKM Layanan UKPBJ	7 Nilai BAIK (83,00) Nilai	7 Nilai BAIK (83,00) Nilai	489.371.300,00	497.371.300,00	380.631.289,00				Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Perangkat Daerah		465.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 Dokumen	80 Dokumen	238.765.100,00	238.765.100,00	196.697.175,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			265.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen	2 Dokumen	111.942.200,00	111.942.200,00	109.307.614,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	300 Orang	138.664.000,00	146.664.000,00	74.626.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Blitar, difokuskan pada pencapaian target-target indikator melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan:
 - a. Menyusun dan memonev rumusan kebijakan bidang bina mental spiritual masyarakat secara berkala
 - b. Mensosialisasikan kebijakan yang mendukung pembinaan mental spiritual masyarakat
 - c. Koordinasi lintas sektor atau antar stakeholder yang intensif guna penguatan komitmen dan penyamaan persepsi terkait implementasi kebijakan bidang keagamaan
2. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan:
 - a. Melakukan sosialisasi Perubahan Perwali RT Keren
 - b. Melaksanakan persewaan aset menggunakan SE Juknis
 - c. Melaksanakan evaluasi pengaturan LKK dalam 3 bulan kedepan (tribulan 1 tahun 2025) sebagai bahan reuiu apabila tidak sesuai dengan kondisi
 - d. Menunggu Perwali Posyandu berproses pelaksanaan LKK Posyandu menggunakan SE Juknis
 - e. Memonev dan mengupdate kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerja sama
 - f. Mengidentifikasi, menganalisa dan memetakan produk hukum daerah
 - g. Melakukan percepatan restrukturisasi melalui penetapan Organ BUMD dengan penguatan komitmen melalui perjanjian kinerja dan penerapan ketentuan Perda yang menjadi dasar penyelenggaraan BUMD
 - h. Optimalisasi Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
 - i. Lebih intensif melakukan koordinasi kepada instansi vertikal sebagai Pembina Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat serta meningkatkan koordinasi lintas OPD guna memfasilitasi perumusan kebijakan yang menjadi kewenangannya meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB serta Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.
 - j. Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan yang mendukung kegiatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat
3. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan:
 - a. Melakukan pemeliharaan dan upgrade aplikasi e-monev
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi RUP, realisasi PBJ pada LPSE dan realisasi PDN secara berkala
 - c. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait guna perumusan kebijakan administrasi pembanguna

- d. Kebijakan pembatasan waktu pengembalian Hasil Revisi Dokumen persiapan pemilihan penyedia oleh OPD sesuai dengan SOP Pengadaan Barjas
 - e. Memilah dan merekap paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan yang berkedudukan di UKPBJ sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan pada Rencana Umum Pekerjaan.
 - f. Memproses pekerjaan/paket pengadaan sesuai dengan urutan jadwal yang telah dientry pada SIRUP LKPP
 - g. Melakukan asistensi Reviu RUP dan membatasi permohonan pembukaan hak akses RUP bagi OPD
4. Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik):
- a. Melakukan pendampingan secara intensif terhadap Perangkat Daerah pengampu dan pendukung RB dengan mengutamakan dampak serta kolaborasi dalam menyusun rencana aksi dan pelaksanaan RB termasuk didalamnya penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik
5. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM:
- a. Pemanfaatan aplikasi sukma-e Jatim dalam pengukuran SKM pada seluruh Perangkat Daerah
 - b. Melaksanakan pembinaan pelayanan publik setiap 3 (tiga) bulan sekali meliputi monev SOP, SP, maklumat pelayanan dan pelaksanaan aturan ketatalaksanaan seperti Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas, SPBE
6. Nilai rata - rata SKM Setda:
- a. Menyusun manajemen data yang lebih tertib
 - b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SI-BAGUS
 - c. Optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI
 - d. Menyusun standar pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang ditetapkan
 - e. Mengintensifkan pembinaan terhadap insan media massa
 - f. Mengintensifkan pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan tentang standar keprotokolan
 - g. Mengevaluasi kinerja pelayanan secara berkala serta menciptakan inovasi untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan
7. Nilai SAKIP Perangkat Daerah:
- a. Menyusun SOP yang mengintegrasikan crosscutting didalamnya
 - b. Menyusun tindak lanjut rekomendasi monitoring pencapaian target jangka menengah
 - c. Menyusun ranwal renstra yang memuat inovasi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun
 - d. Menyusun rancangan LKj IP 2024 yang menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya
 - e. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi, pada dokumen antara lain:
 - 1) Perubahan Renja Perangkat Daerah

- 2) Perubahan Perjanjian Kinerja
- 3) Crosscutting antar Bagian
- 4) Laporan monev renaksi yang menyajikan penyesuaian strategi dan arah kebijakan dan bukti tindak lanjut atas rekomendasi monev renaksi

BAB IV PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar ini, tidak hanya sekedar memenuhi amanat dan menggugurkan kewajiban dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, namun diharapkan memberikan gambaran dan menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah tahun 2025. Renja Perubahan Sekretariat Daerah ini juga sebagai penjabaran Renstra Sekretariat Daerah dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Perubahan Tahun 2025 yang dalam penyusunannya mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sampai dengan tribulan I tahun 2025.

4.1 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai peranan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Rencana Kerja (Renja)) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025.
2. Bagian-bagian dan seluruh pelaksana Sekretariat Daerah Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dokumen Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2025 ini diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta diperlukan komitmen, dedikasi dan kerja keras dari sumber daya di masing-masing Bagian Sekretariat Daerah Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan *good governance* serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional. Dokumen ini juga menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

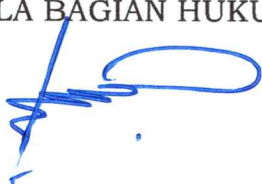
1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025.
2. Sekretariat, Kasi-kasi dan seluruh staf Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN